BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

1.1.1 Dalam konteks penegakan hukum,anggota polisi perlu menjunjungtingginilai-nilaidemokrasi. PenegakanhukumolehpolisitidakharusmelanggarprinsipHak AsasiManusiadan demokrasi.Dengan demikian, konsepsi keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian adalah perlindungan terhadaphak-hakmasyarakatsipil. AntaraHakAsasiManusiadanHukummemilikihubungan yang erat. Penegakan HAM selalu dilandasi oleh aturan hukum. Sebaliknya dalam konteks negara hukum mewajibkan pemerintah melakukan penegakan dan perlindungan HAM kepada warga negaranya.

1.1.2 Pengaturan dan pelaksanaan sanksi bagi Anggota POLRI yang menggunakan dari perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, diatur secara jelas pada Pasal 14 huruf E jo. Pasal 19 ayat 1 huruf b jo. Pasal 21 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 jo Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, namun dalam pelaksanaannya ternyata belum cukup efektif dan pelanggaran paling banyak dilakukan oleh polisi setingkat bintara.Hasil pemantauan komnas HAM, POLRI masih menjadi instansi yang paling banyak mendapat pelaporan pengaduan pelanggaran HAM.

1.2 Saran

1.2.1 UU Kepolisian dan Perkap HAM ini masih memerlukan turunan-turunan berupa aturan teknis yang implementatif. Misalnya dalam bentuk protap, juklak, dan juknis, baik dalam penegakan hukum maupun dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga kamtibmas

1.2.2 Melakukan sosialisasi Perkap tersebut kepada seluruh anggota POLRI terutama kepada anggota Polri yang level kepangkatannya di jenjang

Penerapan Hukum..., Yohanes Ndoa Owa, Magister Hukum 2019

bawah karena mereka itulah yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Dengan kata lain, sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Polri. Di tangan mereka itulah citra Polri di mata masyarakat dipertaruhkan.

Penerapan Hukum..., Yohanes Ndoa Owa, Magister Hukum 2019